



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27. TAHUN 2019**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 – 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.



4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas yang dimulai dari tahun 2018-2022.
9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.



BAB II ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah maka disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; dan
- b. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada beberapa OPD;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri atas:

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

B. Sasaran

C. Kegiatan-kegiatan

D. Rencana Aksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK melalui BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah menerapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang akan terus dikembangkan

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program semua bisa melanjutkan sekolah telah melaksanakan pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, KIA, dan Akte gratis;
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja juga melaksanakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai dengan kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID);
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat



menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
 - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:



1. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;
2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

a. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;
- e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;
- f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

2) Pengawasan

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

- a) Secara kuantitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih perlu ditambah namun secara kualitas sudah cukup baik, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- b) Penerapan SPIP sudah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara maksimal;
- c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas perlu ditingkatkan guna memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;



- d) Sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan.

3) Tatalaksana

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

- a) Mekanisme koordinasi yang kuat antara OPD dan unit kerja di masing-masing OPD, untuk mengurangi berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang akan berakibat pada inefisiensi;
- b) Belum diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan dan penggunaan teknologi informasi sudah sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c) Standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor perlu dilakukan untuk mendorong efisiensi.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai persoalan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- 2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- 3) Penyediaan sarana penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda khusus ASN dan Peratin (Kepala Desa);
- 4) Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;
- 5) Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;
- 6) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
- 7) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B.



c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan melaksanakan distribusi yang merata. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata diseluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) Perizinan Urusan Pertanian
- b) Perizinan Urusan Perikanan
- c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
- d) Perizinan Urusan Pariwisata
- e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
- f) Perizinan Urusan Pertanahan
- g) Perizinan Urusan Kesehatan
- h) Perizinan Urusan Perdagangan
- i) Perizinan Urusan Perindustrian
- j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
- k) Perizinan Urusan Penanaman Modal



Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan kepada masyarakat mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Gratis;
- 2) Program Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor);
- 3) Program pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat melalui Ambulan Hebat.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum ada OPD yang di usulkan berkaitan dengan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

OPD-OPD yang ada dipandang belum siap untuk melaksanakannya, selain belum memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, hal ini di karenakan Lampung Barat belum melaksanakan PMPRB oleh



Inspektorat sebagai leading sektornya. Tetapi diharapkan nantinya juga OPD yang mendapatkan tugas untuk menjadi contoh harus siap untuk di validasi.

OPD yang dipandang sudah mampu untuk dijadikan contoh Zona Integritas diharapkan nantinya bisa menjadi unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu OPD harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik lagi untuk kedepannya.

e. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sesuai dengan perencanaan.

2) Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Listrik



Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya.

b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat.

c) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.

d) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat pegunungan, perbukitan, sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 - 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Lampung Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima

tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.



A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa)

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
3. Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;
4. Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
5. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi terfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat

- mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
 3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mencegah atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah Pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
 - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;



- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
 - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
 3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:

1. Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;



2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.



A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

- a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;
- e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;
- f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD (Survey yang melibatkan Tim Teknis) yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- a) Perizinan Urusan Pertanian
- b) Perizinan Urusan Perikanan
- c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
- d) Perizinan Urusan Pariwisata
- e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
- f) Perizinan Urusan Pertanahan
- g) Perizinan Urusan Kesehatan
- h) Perizinan Urusan Perdagangan
- i) Perizinan Urusan Perindustrian
- j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
- k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

Kedua, Quick Wins. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih akan menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan berkualitas dilakukan dengan inovasi pelayanan diantaranya :

- a. Pelayanan two in one (KK dan KTP), pelayanan three in one (KK, KTP, dan Akta Kelahiran), pelayanan four in one (KK, KTP, Akta Kelahiran, dan KIA), pelayanan five in one (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian/akta perceraian);
- b. Pelayanan dinamis/jemput bola ke sekolah-sekolah (perekaman e-KTP dan KIA);
- c. Pelayanan dinamis/jemput bola ke pekon/desa/kelurahan dan mencetak dokumen di tempat;
- d. Pelayanan pada moment-moment tertentu (Kesrak PKK, KB Kesehatan lomba pekon/desa, bulan Bhakti Gotong Royong, dan Kampung KB);
- e. Pelayanan akte kelahiran secara online, dapat dilakukan dengan hanya menggunakan android yang terhubung dengan internet (registrasi pada <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>).
- f. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui “Diskon Hebat/datang investasi langsung konstruksi dengan hemat, benar, dan cepat (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).
- g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program “Ambulan Hebat” (Kegiatan ini ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam).

c. Kesehatan

Pelaksanaan program kesehatan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya pada sektor kesehatan, antara lain:

(1) Kematian ibu & bayi

Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.



(2) Kasus gizi buruk

Penanganan kasus gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian dari semua sektor terkait, karena persoalan gizi buruk merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan dan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.

(3) Angka kesakitan akibat penyakit menular

Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan pengendalian yang melibatkan peran serta masyarakat dan juga perlu diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya *re-emerging disease*.

(4) Meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM)

Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdampak pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak seimbang, hal tersebut meningkatkan faktor resiko terjangkitnya seseorang dengan PTM. Pencegahan dengan melakukan deteksi dini serta dengan melakukan pola hidup sehat dan seimbang saat ini menjadi prioritas utama yang sedang digiatkan oleh segenap pengambil kebijakan di pemerintahan pusat yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

(5) Pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Target Total Coverage pada tahun 2019, dimana seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat terdaftar sebagai peserta JKN, merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

(6) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.
Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

(7) Ambulans Hebat

Kegiatan ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam.

a. Prinsip Kerja

Prinsip kerja kegiatan Ambulans Hebat adalah :

- Pertolongan harus cepat dan tepat
- Memberikan informed consent
- Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi
- Memindahkan pasien dari rumah ke FKTP
- Memindahkan pasien dari TKP ke FKTP
- Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis sampai tiba di FKTP

b. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pemanfaatan Ambulans Hebat adalah :

- Menerima informasi kegawatdaruratan
- Menuju lokasi pasien
- Menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti
- Pengkajian awal pasien
- Stabilisasi pasien menurut prioritas
- Konsultasi dokter
- Menentukan tindakan pelayanan kesehatan sampai dengan evakuasi rujukan kefasilitas kesehatan lanjutan.



perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada di garis depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

b. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

2) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat

3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.



4) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat perbukitan, pegunungan dan sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten	ASN Lampung Barat yang sesuai dengan standar Kompetensi	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan	2 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan internal secara berkala	163 laporan	163 laporan	163 laporan	163 laporan	163 laporan
	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan	32 laporan	32 laporan	32 laporan	32 laporan	32 laporan
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD LHR Lapkin Pemda	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Peserta Diklat Sertifikasi JFA dan P2UPD	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang

	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4 DC
	Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	4 LHR	4 LHR	4 LHR	4 LHR	4 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD	1 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	Jumlah OPD yang menyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD
	Jumlah dokumen Tatalaksana	2 doku men	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Jumlah OPD yang menyusun SPM	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD
	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi tupksi	1 Doku men	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah OPD yang terbina mengenai pelayanan publik	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD
	Jumlah Dokumen SOP	1 dok	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah kasus yang terselesaikan (SIPP dan SP4N)	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
	Jumlah dokumen kebutuhan PNS	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan publik	6 aplika si	6 aplika si	6 aplika si	6 aplika si	6 aplikasi



d. Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah aparaturnya yang mengikuti penyusunan produk hukum daerah	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah Perda yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda
	Jumlah Perbup dan Keppu yang dilakukan harmonisasi dalam pembentukannya	35 Perbup dan 350 Keppu P	35 Perbup dan 350 Keppu P	35 Perbup dan 350 Keppu P	35 Perbup dan 350 Keppu P	35 Perbup dan 350 Keppu P
	Jumlah peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan ke OPD	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan
	Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan kepada masyarakat	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum
	Jumlah desa/pekon/kelurahan yang mengikuti kegiatan desa sadar hukum tingkat Kabupaten	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan
	Jumlah permasalahan hukum dan aparaturnya yang dilakukan pendampingan bantuan	1 permasalahan dan 1 aparaturnya	1 permasalahan dan 1 aparaturnya	1 permasalahan dan 1 aparaturnya	1 permasalahan dan 1 aparaturnya	1 permasalahan dan 1 aparaturnya

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

c. Kegiatan Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan	32 kasus	32 kasus	32 kasus	32 kasus	32 kasus

d. Semua bisa melanjutkan sekolah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2020	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) SD	11,84 %	11,87 %	11,89 %	11,91 %	11,93 %
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	99,33 %	99,53 %	99,73 %	99,93 %	99,95 %
	Angka partisipasi murni (APM) SD	100%	100%	100%	100%	100%

Angka partisipasi murni (APM) SMP	91,82 %	91,87 %	91,89 %	91,94 %	91,99 %
Angka rata-rata lama sekolah	7,30 tahun	7,35 tahun	7,37 tahun	7,42 tahun	7,44 tahun
Angka harapan lama sekolah	12,27 tahun	12,29 tahun	12,31 tahun	12,33 tahun	12,35 tahun
Angka melanjutkan sekolah	90,35 %	90,60 %	90,75 %	90,83 %	90,85 %
Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SD	209,9 6 poin	210,0 1 poin	210,1 1 poin	210,2 1 poin	210,3 1 poin
Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMP	235,9 1 poin	236,0 1 poin	236,1 1 poin	236,2 1 poin	236,3 1 poin
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	32,09 %	32,11 %	32,13 %	32,15 %	32,17 %

e. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %

f. Saluran Telekomunikasi dan internet

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97%	97%	97%	97%	97%

g. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

NO	Sasaran	Indikator	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi	4 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	9 Puskesmas	4 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan secara mandiri	0 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	8 Puskesmas	3 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan tenaga sesuai standar	3 Puskesmas	6 Puskesmas	9 Puskesmas	12 Puskesmas	15 Puskesmas
2	Meningkatnya upaya promotif dan preventif dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah pekon dengan IKS 0,5-0,8	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon
		Jumlah KK di Pekon/Kelurahan terdata lengkap	60000 KK	19592 KK	0 KK	0 KK	0 KK
3	Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase obat yang memenuhi syarat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
4	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran Hidup	149 Kelahiran hidup	139 Kelahiran hidup	130 Kelahiran hidup	121 Kelahiran hidup	110 Kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7 Kelahiran hidup	4,5 Kelahiran hidup	4,3 Kelahiran hidup	4,1 Kelahiran hidup	3,9 Kelahiran hidup

		Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penurunan prevalensi balita kurus (wasting)	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
		Persentase penurunan prevalensi balita stunting	35 %	32 %	30 %	27 %	25 %
5	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	50 %	55 %	57 %	60 %	62 %
		Persentase Penemuan Kasus Baru TBC	50 %	60 %	65 %	68 %	70 %
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	93 %	95 %	95 %	95 %	96 %
6	Meningkatnya sinergitas dan kemitraan lintas sektor, LSM dan dunia usaha	Persentase Peserta JKN	75 %	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya lingkungan sehat	Jumlah pekon/kelurahan dipicu STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	30 Pekon	33 Pekon	0 Pekon	0 Pekon	0 Pekon
		Persentase rumah sehat	49 %	55 %	60 %	65 %	70 %
8	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai yang diterima (tenaga kesehatan)	30 orang	15 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Tim Monitoring)	4 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Sopir)	20 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah peserta yang mengikuti simulasi	0 orang	45 orang	0 orang	0 orang	0 orang

	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPGD	40 orang	20 orang	0 orang	0 orang	0 orang
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Sopir	20 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
	Jumlah perlengkapan ambulan hebat	10 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket
	Jumlah operasional ambulan hebat	10 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan

h. Indeks Reformasi Birokrasi kategori C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	-	C	C	C	C

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (predikat)	B	B	BB	BB	BB

j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (predikat)	-	C	C	C	C

k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Predikat Sangat Tinggi)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

l. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %



b. Pelayanan Perizinan Terpadu

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73 (B)	75 (B)	76 (B)	78 (B)	80 (B)

c. Pelayanan Gratis Administrasi Kependudukan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,16 %	70%	75%	80%	85%
	Jumlah Keluhan /pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	8,33%	30,55 %	52,77 %	75%	100%
	Cakupan kepemilikan KTP	87%	90%	95%	98%	100%
	Cakupan Kepemilikan KK	85%	87%	90%	95%	100%
	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran	85%	95%	100%	100%	100%
	Cakupan kepemilikan akte perkawinan	50%	55%	60%	65%	70%
	Cakupan kepemilikan akte perceraian	10%	20%	22%	25%	27%
	Cakupan kepemilikan akte kematian	50%	55%	60%	65%	70%

d. Jumlah Investasi Pemilikan Modal Dalam Negeri/Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Investor di Lampung Barat	Jumlah investor Pemilikan Modal Dalam Negeri dan Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)	3 Investor	3 Investor	4 Investor	5 Investor	5 Investor
	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp 3.325.564.458	Rp 3.491.842.681	Rp 3.666.434.815	Rp 3.849.756.556	Rp 4.042.224.384

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Membangun Unit Kerja sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	-	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil PMPRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

6. Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananya Koordinasi TP4D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi TP4D Kabupaten Lampung Barat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

7. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun.
- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk



sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
- 17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
- 18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:



- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
- 5) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 6) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 7) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 8) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 9) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
- 10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan proses pengaduan;
- 2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
- 3) Mengelola pengaduan;
- 4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Semua bisa melanjutkan sekolah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah meliputi:

- 1) Mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak;
- 2) Seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs;
- 3) Bantuan siswa berprestasi;
- 4) Meningkatkan mutu pendidikan;
- 5) Beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
- 6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;



- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan kompetensi guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

- 1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Saluran Telekomunikasi dan internet

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses telekomunikasi dan internet;
- 2) Menyusun rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
- 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 4) Melaksanakan seluruh rencana;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Sistem integrasi layanan Jamkesmas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesmas, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Jamkesnas;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas terintegrasi dan pembiayaannya;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, meliputi:

- 1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
- 2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 5) Melakukan evaluasi;
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi BB atau A, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;



- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

j. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan SIKD, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem SIKD untuk perbaikan;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Mengembangkan sistem SIKD yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 4) Melaksanakan SIKD sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
- 5) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan mengacu pada urusan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja meliputi:



1. Urusan Pertanian
 1. Izin Usaha Obat Hewan
 2. Izin Usaha Peternakan
 3. Izin Rumah Potong Hewan
 4. Izin Rumah Potong Unggas
2. Urusan Perikanan
 1. Surat Izin Usaha Perikanan
3. Urusan Lingkungan Hidup
 1. Izin Lingkungan
4. Urusan Pekerjaan Umum
 1. Izin Mendirikan Bangunan
 2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
 3. Izin Pemasangan Reklame (SIPR)
5. Urusan Pariwisata
 1. Tanda Daftar Pariwisata (TDP)
6. Urusan Komunikasi dan Informasi
 1. Izin Menara Telekomunikasi
7. Urusan Pertanahan
 1. Izin Lokasi
8. Urusan Kesehatan
 1. Surat Izin Rumah Sakit
 2. Surat Izin Apotik
 3. Surat Izin Toko Obat
 4. Surat Izin Klinik
 5. Surat Izin Pendirian Optik
 6. Surat Izin Laboratorium Klinik
 7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 8. Surat Izin Operasional Puskesmas
 9. Surat Izin Praktik Dokter
 10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
 11. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
 12. Surat Izin Apoteker
 13. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian



14. Surat Izin Praktik Perawat
 15. Surat Izin Praktik Bidan
 16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
 17. Surat Izin Fisiotrafis
 18. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
9. Urusan Perdagangan
1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
 6. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)
10. Urusan Perindustrian
1. Izin Usaha Industri (IUI)
 2. Tanda Daftar Industri (TDI)
 3. Tanda Daftar Usaha (TDU)
11. Urusan Bidang Koperasi dan UKM
1. Izin Usaha Simpan Pinjam
12. Urusan Tenaga Kerja
1. Izin Operasional Penyedia Tenaga kerja Migran
 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 3. Kartu Pencari Kerja (AK1)
 4. Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran
 5. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
13. Urusan Penanaman Modal
1. Izin Prinsip Penanaman Modal
 2. Izin Perluasan Penanaman Modal
 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
 5. Izin Usaha



4) Penerapan PTSP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

- (1). Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja;
- (2). Pembentukan Tim Teknis Perizinan;
- (3). Menyusun SOP, SPP, dan maklumat Pelayanan;
- (4). Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- (5). Melaksanakan Sosialisasi (secara langsung, media cetak);
- (6). Pendampingan layanan perizinan oss.go.id;
- (7). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat;
- (8). Pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan (helpdesk);
- (9). Pengawasan dan Evaluasi.

5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang telah ditetapkan;
- (d). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
- (e). Monitoring
- (f). Evaluasi
- (g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.



Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

	Program	Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	1) Analisis Jabatan 2) Analisis beban Kerja 3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan 4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan OPD (termasuk tenaga auditor dan guru) 5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai 6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru 7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu 8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai 9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor) 11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai 12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai 13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
		14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya 15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian <i>role model</i> 17) Monitoring 18) Evaluasi 19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2.	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM) 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM) 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP

Program		Kegiatan
		4) Pencrapan SPIP 5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 6) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 7) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh OPD 8) Sosialisasi tertib administrasi keuangan 9) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di OPD 10) Sosialisasi LHKPN 11) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat 12) Monitoring 13) Evaluasi 14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3.	Penataan Tatalaksana	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan 2) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 3) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih 4) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan SIKD) 5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk SIKD) 6) Penerapan keterbukaan informasi publik 7) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis 8) Penyusunan rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet 9) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet 10) Pembukaan akses internet baru 11) Monitoring 12) Evaluasi 13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Program		Kegiatan
4.	Penguatan Akuntabilitas	1) Review rencana strategis pemerintah daerah 2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya 3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 5) Pelaksanaan manajemen kinerja 6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan) 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat 4) Pengkajian penerapan PTSP 5) Pengembangan PTSP 6) Penerapan teknologi informasi 7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional) 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6.	Penerapan PTSP	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)

Program		Kegiatan
		(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat
		(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)
		(4). Sosialisasi
		(5). Monitoring
		(6). Evaluasi
		(7). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		(8). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	Rencana Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;
		(2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih
		(3). Uji coba
		(4). Penyempurnaan hasil uji coba
		(5). Sosialisasi
		(6). Penerapan
		(7). Monitoring
		(8). Evaluasi
		(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		(10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
8.	Zona Integritas	(1). Penyiapan OPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di pada OPD yang ditetapkan
		(4). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		(5). Monitoring
		(6). Evaluasi
		(7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
9.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
10.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2022
11.	Penguatan dan Penataan Organisasi	

4. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan pada masing-masing OPD.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi reformasi birokrasi sebagai berikut :



**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022**

[illegible]

Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB dinilai masih belum terlalu kuat dan merata di seluruh unit kerja	meningkatkan validitas data pelaku ekonomi daerah	Jumlah buku data pelaku ekonomi Kab. Lampung Barat	Pendataan Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	1. membuat SK Bupati tentang Tim Koor Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 2. Rapat Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 3. Pembuatan Buku Data Pelaku Ekonomi	Bagian perekonomian dan SDA														
Terlaksananya Proses Surat Menyurat	Jumlah Surat Dilayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat masuk melalui bagian umum disposisi Asisten, Sekda, Distribusi ke OPD terkait		Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terlayannya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rekening listrik, Telepon, air diterima dibayarkan		Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√	



Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Tarup,Kursi,So und disewa jika ada Kegiatan Pemda		Kasubbag Rumah Tangga												√	√	√	√
Tersedianya Makanan dan Minuman	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Rumah Tangga												√	√	√	√
Tersedianya Biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawai an												√	√	√	√



Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Biaya Rapat koordinasi di gunakan seluruh bagian dilingkup Sekretariat sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawai an											√	√	√	√
Tersedianya Kamar Penginapan	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Sewa gedung/ Penginapan digunakan pada saat ada tamu		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
Tersedianya biaya Jasa TV berbayar, inte rnet dan sandi	Terlayani nya Administ rasi Perkanto ran Dengan Baik	Pelayanan Administ rasi Perkantor an	Jasa indivision dan Kavision dibayar setiap Bulan		Kasubbag Umum & Kepegawai an											√	√	√	√

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya Kinerja Pelayanan Administrasi Keuangan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Honor petugas kebersihan dibayarkan, alat kebersihan terpenuhi, pemeliharaan rumah jabatan dapat dilaksanakan		Kasubbag Rumah Tangga									√	√	√	√
Terjaganya Perlengkapan Rumah Dinas Dengan Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Rumah Jabatan / Dinas		Kasubbag Rumah Tangga									√	√	√	√
Terjaganya Peralatan Rumah Dinas dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga									√	√	√	√
Terjaganya peralatan Gedung Kantor dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian									√	√	√	√



	Terpeliharanya Meubeler dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
	Bertambahnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan	Meningkatnya Pengetahuan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian											√	√	√	√
	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan											√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan											√	√	√	√

	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√

	Meningkatkan layanan kedinasan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Singronisasi program dengan Kebutuhan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	1. Membuat Undangan 2, Pelaksanaan Audensi		Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemkab. Lampung Barat	Presentase OPD yang Indeks Reforasi Birokrasi nya minimal baik	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembuatan SK Tim		Bagian Organisasi										√	√	√	√
				Pembuatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi												√	√	√	√
				Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi												√	x	X	x
	Persepsi dan penerapan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur	Meningkatnya pola pikir dan budaya kinerja aparatur Dinas Ketahanan	Persentase aparatur yang kinerjanya baik		Mengirimkan peserta diklat, perubahan perilaku kerja											x	√	√	√

[illegible]

	Sebagian besar pegawai belum memiliki kompetensi bidang tugasnya	Meningkatnya kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya	Persentase peningkatan kapasitas pegawai : 50 %	Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan data dan informasi ketahanan pangan : 100%	Pelatihan Analisa Ketahanan Pangan	Jumlah peserta pelatihan : 10 org	Sekretaris											√	√	√	√
		Tersusunnya indikator kinerja individu	Persentase pemenuhan dokumen kinerja : 100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan 100%	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis	Sekretaris											√	√	√	√
		Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIP) online	Persentase pegawai yang telah mengisi SIP online : 100%																√	√	√	√



7	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksanaan pengelolaan SDM yang berbasis merit masih belum dimulai.																			√	√	√	√
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



Kemampuan unit kerja pengelola SDM Pemerintah Kab. Lampung Barat masih berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan kinerja, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir pegawai.	idem	Persentase ASN yang di Mutasi, Promosi sesuai pola karir	idem	SDA	SDA													√	√	√	√
---	------	--	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

[illegible]

B	Penataan Peraturan Perundang-Undangan																				
1	meningkatkan pengendalian fluktuasi harga bahan pokok		pemantauan harga dan distribusi sembako	Berkurangnya Beban Masyarakat Menjelang Hari Raya	14000 Paket	Bagian perekonomian dan SDA												x	x	x	x
				Meminimalisir Penyelewengan Pelaksanaan Program Rastra	15 Kecamatan	Bagian perekonomian dan SDA												√	√	√	√

				Terpantaunya tingkat inflasi Kabupaten Lampung Barat	12 Bulan	Bagian perekonomian dan SDA											√	√	√	√
	Meningkatnya Persentase Produk Hukum yang Terbentuk dan Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1. Persentase Pembentukan Produk Hukum yang Terealisasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan														√	√	√	√
		2. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan															√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi Pembentukannya			- Membuat SK Bupati Kegiatan												√	√	√	√



[illegible]

[illegible]

Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah siswa/ siswi yang Mengikuti Penyuluhan Hukum			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Membuat surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilanjutkan ke Sekolah																	
				- Melaksanakan Penyuluhan Hukum di Sekolah																	
				- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	



Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di desa/kelurahan	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori desa sadar Hukum Tingkat Kabupaten				- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan													√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan																
					- Memverifikasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum																

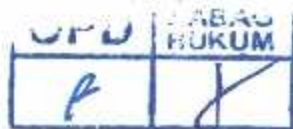


[illegible]

[illegible]

[illegible]

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM	Jumlah Data Pendukung Capaian RANHAM Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah sesuai Prosedur			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan														√	√	√	√
				- Membuat surat ke OPD																	
				- Memverifikasi data pendukung dari OPD																	
				- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																	
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah produk hukum inisiatif DPRD														100 %	√	√	√	√
			4 Buah																		



2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintah	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah	50%	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi											√	√	√	√
					Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi														
					Evaluasi Kelembagaan	Bagian Organisasi														

C	PENATAAN TATALAKSANA																			
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi											√	√	√	√
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Presentasi OPD yang melakukan tata naskah dinas sesuai peraturan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi											√	√	√	√



	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah daerah		12 Bulan	1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan pada Masyarakat	Bagian perekonomian dan SDA					√	√	√	√
--	---	---	--	----------	--	-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	---

OPD	KAB. HUKUM
	

	Meningkatnya e government	Persentase mekanisme kerja yang menerapkan e government	Program e- Jurnal	Tersedianya e jurnal untuk memuat hasil penelitian	Jurnal Kelitbangan	Kasubbid Kerjasama dan Publikasi								√	√	√	√
	Meningkatnya mekanisme dan prosedur pelayanan di Disbunnak	Jumlah Dokumen SOP yang baku	Penerapan SOP			Disbunnak								√	√	√	√



[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kasubbag Perencanaan Pengadaan											√	√	√	√
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan											√	√	√	√
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan											√	√	√	√
Persepsi dan penerapan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur	Meningkatnya pola pikir dan budaya kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Persentase aparatur yang kinerjanya baik	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah aparatur yang meakukan pelatihan/ diklat ; 2 orang	Mengirimkan peserta diklat, perubahan perilaku kerja											√	√	√	√

Sebagian besar pegawai belum memiliki kompetensi bidang tugasnya	Tersusunnya indikator kinerja individu	Persentase pemenuhan dokumen kinerja : 100%	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis	Mempersiapkan data pendukung Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD												√	√	√	√
					Membahas dan Memeriksa Draf Laporan															
					Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan															
	Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIP) online	Persentase pegawai yang telah mengisi SIP online : 100%			pengumpulan berkas dan entry data Masing-masing ASN ke aplikasi SIP Online															
Meningkatnya kualitas Penyuluh Pertanian dan	Persentase Penyuluh Pertanian dan Lembaga	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan	Pelatihan Penyuluhan Pertanian	58,451,500	Membuat SK Panitia, Narasumber dan Peserta												√	√	√	√

[illegible]

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									√	√	√		√	
4 Dokumen																		
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran										√	√	√	√	
				1 Dokumen														
				Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran										√	√	√	√	
				1 Dokumen														

			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun															√	√	√	√
			1 Dokumen																		
			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD															√	√	√	√
			18 Dokumen																		
			Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah															√	√	√	√
			12 Orang																		
			Jumlah dokumen Renstra OPD					-	-	-	-	-	-	-	x	x	x				x
			1 Dokumen																		

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan	Nilai SAKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													√	√	√		√
4 Dokumen																				
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran												√	√	√		√	
			1 Dokumen																	
			Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran												√	√	√		√	
			1 Dokumen																	
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun												√	√	√		√	

[illegible]

6	Tersusunnya PKPT berbasis Risiko	Jumlah PKPT Berbasis Risiko		4 PKPT Berbasis Risiko	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat											√	√	√	√
	Tersusunnya Peta Auditan	Jumlah Peta Auditan		16 Peta Auditan													√	√	√	√

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>y</i>

[illegible]

[illegible]

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>h</i>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					Mela kuka n Sosia lisasi dan Prose s Entry Data SiAP Onlin e															
					Mela kuka n Monit oring atas Entry bulan an Data SiAP Onlin e															
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Peningk atan Fungsi dan Peran Kelemb agaan Daerah		Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Mem buat SK Tim Koor dinas i Monit oring dan Evalu asi Pelak sana												√	√	√	

[illegible]

OPD	KABAG HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	4 SKHU														√	√	√	√
			Penyediaan Makanan dan Minuman	24 Kali														√	√	√	√
				24 Kali														√	√	√	√
			Rapat-Rapat Koord.& Konsul. ke Luar Daerah	12 Bulan														√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi/ Pameran	1 Kali														√	√	√	√

			Rapat-Rapat Koord.& Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan															√	√	√	√
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit																		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit																		

[illegible]

			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen													√	√	√	√
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen													√	√	√	√
			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen													√	√	√	√

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Tes Urine bagi Pejabat dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Jumlah PNS yang mengikuti tes urine	168,000,000														√	√	√	√
		Sosialisasi dan Pelatihan Satgas Anti Narkotika	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	200,656,000														√	√	√	√

[illegible]

		Tim Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampu ng Barat	Jumlah laporan tim desk pemilu Bupati	-														-	-	-	
		Tim Desk Pemilu Gubern ur dan Wakil Gubern ur Lampu ng	Jumlah laporan tim desk pemilu Gubernur	299,928,000														-	-	-	
		Tim Desk Pemilu Legislasi f dan Pemilu Preside n/ Wakil Preside n	Jumlah laporan tim desk pemilu Legislatif dan Presiden	-																	
Meningkatkan	Indeks kepuasan Pelayanan	1. Pelayan an Pendaft aran	Lamanya Pembuatan KTP (1 hari)	Jumlah KK yang Terbit														√	√	√	√

[illegible]

OPD	KABAG HUKUM
<i>f</i>	<i>A</i>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelayanan dan Perluasan Akses Komunikasi dan Informasi															√	√	√	√
			Jumlah Peserta	40 Orang																	
Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah Alat Studio	8 Unit														√	√	√	√

[illegible]

[illegible]

Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Jumlah Peserta	100 Peserta															√	√	√	√
Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Jumlah website	1 Website															√	√	√	√
Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Jumlah Lokasi Yang dikunjungi	46 Lokasi/13 Kecamatan															√	√	√	√

Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment	% OPD yang melaksanakan E-Governmend	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)															√	√	√	√
			Jumlah Tim Bankom	4 Orang	Monitoring kondisi wilayah																
					Pelaksanaan Bankom di lokasi bencana																
					Laporan pelaksanaan kegiatan																
Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment			Jumlah Pengembangan Android	1 Unit	Koordinasi dan Konsultasi ke Kekominfo													√	√	√	√

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment			Jumlah Website	1 Website	Koordinasi dan Konsultasi ke Diskominfo Propinsi, PT. Telkom dan Kemkominfo RI											√	√	√	√
					Melakukan Pemeliharaan Jaringan Server														
					Melakukan pembelian Barang berupa RAM, Laptop, Inverter,														

Tersedianya Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM)			Tersedianya Sarana Komunikasi Radio	11 Unit	Menyusun Ilang Perkiraan Sendiri													√	√	√	√
					Proses Pengadaan																
					Serah Terima Barang																
					Pembayaran																
Tersedianya Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM)			Jumlah Kecamatan	15 Kecamatan	Monitoring di 15 Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat													√	√	√	√
Meningkatnya Data informasi Hasil Pembangunan yang akurat	Meningkatnya Data Informasi Hasil Pembangunan yang Akurat	Program Pengembangan Data/Informasi /Statist	Penyajian Data Statistik Sektoral															√	√	√	√



Kurangnya Kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat tanpa pengawet	Meningkatnya jumlah produk hasil perikanan yang sehat	Jumlah produk olahan ikan	Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		Bidang Pengendalian dan Pemasaran	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan		√	√	√	√
---	---	---------------------------	--	--	-----------------------------------	--	--	---	---	---	---

Belum sesuaiya Produksi Perikanan dengan Penebaran Benih Ikan Pada Masyarakat / Kelompok Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan					√	√	√	√
---	-------------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---	---	---



Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan		Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengendalian dan Pemantauan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan										√	√	√	√
---	--	--	---	--	--	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

banyak embung/cek dam yang tidak terawat sehingga mengurangi fungsi embung/cek dam tersebut		Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengendalian dan Pemantauan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SP T, Membuat laporan											√	√	√	√
---	--	--	---	--	--	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

	Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan Daerah rawan bencana terutama longsor dan gempa		Masyarakat yang tertimpa bantuan Bencana	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Memfasilitasi Operasional Pengelolaan Bantuan Bencana													√	√	√	√
				Bantuan dan Penanggulangan Bencana	Memfasilitasi Operasional Pengelolaan Bantuan Bencana dan mendampingi dalam penyerahan bantuan bencana																
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.	indeks kepuasan pelayanan masyarakat.	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur															√	√	√	√
2		Persentase unit kerja Dinas yang menerapkan pelayanan berbasis IT secara terintegrasi																			

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat																		√	√	√	√
	Persentase informasi pembangunan yang dipublish kepada masyarakat secara up to date																					
Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas/JKN)	Persentase Pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI rawat inap yang dilayani	Penyediaan makanan pendamping pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI	Menyediakan makan minum pendamping pasien Jamkesmas/JKN PBI (70 org x 12 bln x 3 kl x 5 hr)	23,775,000															√	√	√	√

[illegible]

	meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks kepuasan masyarakat	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi RS berbasis IT	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat														√	√	√	√
--	--	----------------------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap tiga bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam tigabulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-

masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan



yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;

3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam satu tahun sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.



Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABANG HUKUM	